NOTULENSI AUDIENSI DAN KOORDINASI STRATEGIS

Tim Analisis Strategis Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

I. Informasi Umum Pertemuan

• Agenda: Audiensi dan Penyelarasan Program Strategis Sektor Perindustrian dan Perdagangan

• Instansi Tujuan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah

• Pihak Penerima: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran Kepala Bidang

II. Pokok Pembahasan dan Arahan Strategis

1. Peran Strategis dan Tugas Pokok Disperindag Sulteng

Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sektor perindustrian dan perdagangan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku. Ruang lingkup utama (tupoksi) mencakup pembinaan industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen. Posisi Disperindag berada di tengah sebagai penyeimbang (balancing) antara sektor hulu (perdagangan/penyediaan bahan baku) dan sektor hilir (pengolahan industri) guna memastikan rantai pasok berjalan optimal.

2. Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah (Kelapa, Perikanan, dan Durian)

• Pengembangan Komoditas Kelapa: Pemerintah terus mendorong komoditas kelapa agar mampu menembus pasar nasional maupun internasional. Hilirisasi industri kelapa di Sulawesi Tengah telah berkembang, seperti di Kayumalue (Kota Palu) yang memproduksi tepung kelapa, konsentrat, serta produk turunannya, dan PT. Sonokeling Enam Sembilan / Sol And Son di Kabupaten Banggai sebagai pabrik pengolahan kelapa. Pendekatan kini telah bergeser dari sekadar penjualan kelapa

kupas mentah menuju industrialisasi pengolahan tingkat lanjut. Peningkatan SDM petani terus digenjot agar hasil panen memenuhi standar mutu pabrik. Contoh sukses termasuk produksi nata de coco di Kabupaten Parigi Moutong melalui pendampingan sentra Industri Kecil Menengah (IKM).

• Komoditas Perikanan: Fokus pengembangan juga diarahkan pada potensi perikanan yang melimpah di Sulawesi Tengah untuk diintegrasikan ke dalam ekosistem industri guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

• Potensi dan Tantangan Ekspor Durian: Per Juni 2026, volume ekspor durian Sulawesi Tengah telah mencapai angka 7.000 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp1 miliar. Tantangan ke depan adalah mendorong hilirisasi durian agar tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi seperti pasta, permen, dan olahan lainnya. Regulasi ekspor yang dinamis terus diantisipasi melalui penciptaan inovasi baru.

3. Stabilitas Harga, Pengendalian Pasar, dan Perlindungan Konsumen

• Respons Cepat Aduan Publik (Berani Samporoa): Terkait pengaduan masyarakat mengenai ketersediaan LPG, Disperindag langsung berkoordinasi dengan OPD tingkat kabupaten untuk menurunkan Satgas pengawasan ke lapangan.

• Operasi Pasar Murah: Guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok, Disperindag secara berkala menggelar operasi pasar murah di berbagai titik strategis yang disubsidi oleh pemerintah daerah.

• Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen): Berfungsi sebagai lembaga arbitrase untuk membentengi hak konsumen, memfasilitasi pelaporan atas ketidaksesuaian transaksi, serta menyelenggarakan sidang penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Pemerintah juga terus menjaga pasokan dengan mengontrol daerah penghasil sesuai kebutuhan industri.

4. Penguatan Legalitas IKM: Sertifikasi Halal dan HAKI

• Kuota fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan label halal mengalami peningkatan signifikan hingga bulan Oktober, dengan target kuota mencapai 13.000 bagi pelaku IKM.

• Pemerintah mendorong agar para pelaku IKM dan UMKM di kabupaten/kota dapat

mengurus legalitas secara mandiri. Meskipun anggaran fasilitasi daerah saat ini telah berkurang, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH tetap dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku IKM—khususnya kategori self-declare bagi usaha berisiko rendah. Saat ini, kuota yang ada telah habis terserap dan dinas sedang menantikan alokasi kuota tambahan untuk tahun 2027.

• Sebagai langkah pengamanan pasokan bahan baku, para pelaku industri didorong untuk memiliki kebun binaan (binaan/kemitraan) guna menjamin kesinambungan produksi pabrik.

5. Political Will Gubernur, Kinerja, dan Inovasi Pelayanan Publik

• Audiensi ini turut mengevaluasi sejauh mana implementasi political will Gubernur Sulawesi Tengah diimplementasikan melalui program kerja Disperindag tahun ini berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dinas.

• Disperindag terus menghadirkan inovasi pelayanan publik, termasuk peluncuran aplikasi layanan lanjutan serta inovasi baru guna merespons dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat.

• Dalam hal keterbukaan informasi, Disperindag Sulteng aktif mengelola sarana media sosial resmi (disperindag.sultengprov) sebagai pusat pembaruan kegiatan dan transparansi program kepada publik.